

PERAN K.H. HISYAM DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TAHUN 1920-1937

K.H. HISYAM ROLE IN THE DEVELOPMENT OF MUHAMMADIYAH EDUCATION IN 1920-1937

Oleh: Faisal Anas, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, anasfaisal214@gmail.com.

Abstrak

Pendidikan merupakan penyebab langsung berdirinya organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Pendidikan Muhammadiyah yang pada awalnya masih terbatas di Yogyakarta kemudian tersebar ke seluruh wilayah Indonesia ketika salah satu anggotanya, yaitu K.H. Hisyam dilantik menjadi Ketua Bagian Sekolahan tahun 1920. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pendidikan Islam di Indonesia pada abad ke-19, peran K.H. Hisyam dalam pengembangan pendidikan Muhammadiyah selama kurun waktu 1920-1937 dan pengaruhnya terhadap keberadaan sekolah Muhammadiyah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada abad ke-19, pendidikan Islam di Indonesia masih bersifat tradisional kemudian berubah ketika gagasan pembaruan Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20. Salah satu organisasi yang berupaya menyebarkan ide pembaruan Islam menggunakan pendidikan adalah Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah berkembang pesat ketika K.H. Hisyam memimpin Bagian Sekolahan pada tahun 1920. Keterlibatannya dalam bidang pendidikan Muhammadiyah membawa berbagai perubahan seperti perubahan kurikulum, meningkatnya jumlah sekolah Muhammadiyah, dan perubahan kualitas gurusekolah Muhammadiyah.

Kata kunci: Pendidikan, K.H. Hisyam, Muhammadiyah

Abstract

Education was the main cause of the formation of the Muhammadiyah movement in 1912 in Yogyakarta. Muhammadiyah's education was initially limited in Yogyakarta and then spread throughout Indonesia when one of its pioneering figures was K.H. Hisyam. He was chosen to be the School and Education Minister in 1920. This research aims to determine the condition of Islamic education in Indonesia in the 19th century, the role of K.H. Hisyam in the development of Muhammadiyah education during the period 1920-1937 and its influence on the existence of Muhammadiyah schools. The method used in this study is a critical historical method consisting of four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that in the 19th century, Islamic education in Indonesia was still traditional in nature and then changed when the idea of Islamic reform entered Indonesia in the early 20th century. One organization that seeks to spread the idea of Islamic reform using education is Muhammadiyah. Muhammadiyah's education developed rapidly when K.H. Hisyam led the School Section in 1920. His involvement in the field of Muhammadiyah education brought various changes such as curriculum changes, an increasing number of Muhammadiyah schools, and changes in the quality of Muhammadiyah school teachers.

Keywords: Education, K.H. Hisyam, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Perubahan sikap pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad ke-20 dalam menghadapi bangsa Indonesia membawa pengaruh baru dalam berbagai aspek, salah satunya adalah perluasan pendidikan. Tujuan perluasan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial itu semata-mata diarahkan untuk kepentingan elit masyarakat kolonial, disamping seakan-akan juga memperhatikan kesempatan pendidikan kepada pribumi. Pendidikan model seperti ini menitikberatkan pada pengembangan aspek kognitif, sementara aspek-aspek lain tidak begitu diperhatikan.¹

Sebelum adanya pemerintah kolonial yang membawa pendidikan modern, masyarakat pada umumnya menggunakan metode pendidikan tradisional, yaitu sistem pesantren². Di dalam pendidikan tradisional tersebut tidak dikenal ilmu pengetahuan umum karena dianggap menyesatkan. Ilmu yang dianggap bermanfaat hanyalah ilmu agama. Secara kultural, pendidikan yang dipimpin oleh ulama-ulama tradisional menolak semua kebudayaan Barat. Pengawasan Belanda

terhadap pesantren dan murid-muridnya yang ketat telah membuat pesantren menjaga jarak, bahkan bersikap nonkooperatif secara total dan apriori terhadap apa saja yang datang dari Barat. Situasi dan kondisi inilah yang mendorong K.H. Ahmad Dahlan, seorang ulama dan *ketib* Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tinggal di kampung Kauman³, untuk menjembatani pertentangan antara pendidikan modern milik pemerintah kolonial dan pendidikan tradisional yang menekankan agama Islam. Titik akhir dari pemikirannya diwujudkan dengan mendirikan sekolah bernama *Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah*. Berdasarkan namanya, Sekolah Dasar Agama Islam, sudah menunjukkan perpaduan unsur sekolah Barat dan pesantren, sekaligus melampaui batasan-batasan yang dimiliki kedua lembaga itu.⁴

Berdirinya sekolah ini diikuti dengan pendirian organisasi bernama Muhammadiyah pada tahun 1912. Selanjutnya, pembangunan sekolah di Kauman juga diikuti dengan pendirian beberapa sekolah baru di kawasan Residensi Yogyakarta, yaitu di Karangjajen, Yogyakarta pada 1913, di Lempuyangan tahun 1915, di Pasar Gede (Kota Gede) tahun 1916,

¹Yahdan Ibnu Humam Saleh, "Colonial Education Policy & Muhammadiyah's Education (Analitical Muhammadiyah History in Yogyakarta 1912-1942)", *Jurnal Al-Jamiah*, No. 47, 1991, hlm 68.

²Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam. Pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga dakwah, pengkaderan ulama, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat. Lihat Mohammad Subhan dan Soeleiman Fadeli, *Antologi NU Buku I Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 133.

³Kauman di Yogyakarta adalah salah satu tempat tinggal penduduk. Para *kaum* (*qoum*, b. Arab), warga yang mengurus Masjid, tinggal di sekeliling Masjid Agung, sehingga tempat mereka itu disebut Kauman. Lihat M. Sudja', *Cerita tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan: Catatan Haji Muhammad Sudja'*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 3-4.

⁴*Ibid.*, hlm. 27.

dan seterusnya.⁵ Kemajuan yang terjadi dalam bidang pendidikan Muhammadiyah ini pada gilirannya menuntut diadakannya sebuah badan kepengurusan agar mampu mengimbangi perkembangan yang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan ini dibentuk sebuah bagian yang bernama bagian sekolahan pada tahun 1920. Sebagai ketua ditunjuk K.H. Hisyam yang sudah berpengalaman dalam bidang pendidikan di Muhammadiyah. Kehadiran K.H. Hisyam dalam menangani Bagian Sekolahan membuat pendidikan Muhammadiyah berkembang selama tahun 1920-1937. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan referensi mengenai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada abad ke-19, peranan K.H. Hisyam dalam pengembangan pendidikan Muhammadiyah tahun 1920-1937 dan pengaruhnya terhadap keberadaan sekolah Muhammadiyah.

METODE PENELITIAN

Metode sejarah adalah suatu proses untuk menguji dan menganalisa secara kritis mengenai rekaman-rekaman serta peninggalan masa lampau.⁶ Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis terdiri dari empat tahap pokok yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pertama, heuristik adalah kegiatan mencari dan

mengumpulkan sumber sejarah yang diperlukan. Kedua, kritik adalah upaya untuk mendapatkan keaslian sumber, dapat dibagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Ketiga, interpretasi adalah penafsiran atas fakta-fakta sejarah yang terdapat pada sumber. Tahap akhir, historiografi adalah proses penulisan atau penyampaian dalam bentuk karya sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Islam di Indonesia pada Abad ke-19

1. Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya hingga menjelang abad 20 masih bersifat tradisional. Lembaga pendidikan ini diwakili oleh pesantren dan surau. Pesantren merupakan lembaga tradisional yang berkembang di Jawa⁷, sedangkan Surau berakar dari kebudayaan Minangkabau.⁸

Lembaga pendidikan Islam tradisional lebih mengutamakan pembelajaran agama. Materi yang umumnya diajarkan di lembaga pendidikan ini umumnya *nahwu, sharaf, fikih-ushul fikih, hadits, tafsir, tauhid, tasawuf* dan etika, serta cabang-cabang ilmu lainnya seperti *tarikh* dan *balaghah*. Diantara sederet ilmu-ilmu tersebut, fikih menjadi prioritas untuk

⁵Muhammad Raihan Febriansyah, dkk., *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah, 2013), hlm. 5.

⁶Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 35.

⁷Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 139.

⁸Seno, *Peran "Kaum Mudo" dalam Pembaharuan Islam di Minangkabau 1803-1942*, (Padang: BPSNT Padang Press, 2010), hlm. 27.

menjadi bahan pelajaran. Bagaimanapun, pengejaran ini telah membentuk pribadi alumni, khususnya pesantren maupun menjadi fundamentalis yang tidak menolak segala hal yang datangnya dari Barat.⁹ Pada gilirannya, hal ini melahirkan sikap inferior yang dimiliki santri dalam menghadapi lingkungan di luar mereka.¹⁰

Kondisi ini diperparah dengan budaya *taklid*¹¹ berlebihan kepada kyai. Seorang kyai mendapat penghormatan tinggi, bahkan ia dimuliakan hingga hari tuanya, tidak jarang juga setelah kematiannya pengaruhnya masih kuat. Santri memandang kyai sebagai orang yang harus dihormati yang memiliki kekuatan untuk mendatangkan berkah maupun kecelakaan. Karenanya, mereka tidak berani untuk mengkritik ataupun menentang kyai lantaran takut mendapat bencana seperti disumpahi kyainya sehingga ilmunya tidak bermanfaat.¹² Efeknya, pemikiran Islam mengalami kemunduran sehingga tidak mampu menghadapi perubahan zaman.

2. Masuknya Gagasan Pembaruan Islam

Selama abad ke-19, baik secara politik, ekonomi, maupun kultural, dunia Islam telah tunduk dan jatuh di hadapan kolonialisme

bangsa-bangsa Barat. Dampak kolonialisme Barat menorehkan jejak yang begitu buruk. Secara umum, komunitas muslim telah jatuh ke titik kemerosotan. Di mata bangsa Barat, kaum muslim adalah warga kelas dua yang tidak memiliki kehormatan dibandingkan mereka.¹³

Situasi yang tidak begitu menguntungkan bagi komunitas Islam tersebut pada gilirannya membuat para intelektual muslim berpikir untuk mengejar ketertinggalan mereka dari bangsa Eropa. Di jazirah Arab, muncul gerakan pemberontakan suku-suku Nejd terhadap Dinasti Turki Utsmani yang kala itu melemah. Pelopor pemberontakan ini adalah Muhammad ibn Abdul Wahab yang mengajak serta Muhammad ibn Saud, penguasa di Nejd sebagai rekannya. Muhammad ibn Wahab adalah seorang badui yang memelopori gerakan revivalis Islam¹⁴ yang berdasarkan semangat puritan-radikal yang berusaha memurnikan Islam khas padang pasir dengan kekerasannya.

Paham Wahabi ini tidak hanya menyebar di kawasan Arab saja, namun juga masuk ke tanah air pada abad awal abad ke-19. Mereka yang membawa paham Wahabi ini

⁹Farid Setiawan, *Genealogi dan Modernisasi Sistem Pendidikan Muhammadiyah 1911-1942*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2015), hlm.145.

¹⁰Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 99.

¹¹Taklid: Mengikuti sesuatu tanpa mengetahui dasar hukumnya.

¹²*Ibid.*, hlm. 26.

¹³Suwarno, *Pembaruan Pendidikan Sayyid Ahmad Khan dan K.H. Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 16.

¹⁴Revivalisme Islam merupakan gerakan kebangkitan kembali Islam. Gerakan ini ingin mengembalikan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang murni. Achmad Jainuri, dkk., *Muhammadiyah dan Wahhabisme: Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), hlm. 74.

adalah kaum muslim yang menunaikan haji sekaligus belajar di Makkah. Pembawa paham puritan ini pada tahap awal ini adalah Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Piobang yang kembali ke Minangkabau pada tahun 1803 setelah menunaikan ibadah haji di Makkah. Selain ketiga orang ini muncul tokoh lain dari Gerakan Paderi, yaitu Muhammad Syabab yang kemudian hari mendapat julukan Tuanku Imam Bonjol.

Para penganut paham ini berusaha merombak masyarakat secara radikal dan dalam banyak hal tidak jarang mengguguk kekerasan. Karena itu, tidak jarang antara kaum Paderi dan kaum adat meletus perang. Hasil dari pertempuran-pertempuran ini lebih banyak dimenangkan oleh kaum Paderi. Kedatangan Belanda di Padang pada tahun 1819 mengancam kemenangan kaum Padri. Para penghulu yang anti Padri dan keluarga kerajaan yang masih hidup meminta bantuan kepada Belanda. Perang Paderi berakhir tahun 1838 ketika Belanda berhasil menaklukkan Daludalu.¹⁵

3. Modernisasi Pendidikan Islam

Jika pada awal abad 19 gerakan pembaruan sifatnya revivalis, maka di paruh akhir abad 19 corak gerakan ini bersifat modernis. Gerakan pembaharuan, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Tafsir dari karya Harun Nasution, khususnya dalam agama Islam mendapat pengaruh dari modernisasi di dunia Barat yang memiliki

dasar Kristen.¹⁶ Modernisasi Barat diartikan sebagai usaha mengubah paham, pikiran, adat istiadat, lembaga-lembaga lama untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern. Dalam proses modernisasi norma-norma kehidupan dan pemikiran modern digunakan untuk mengkaji tradisi-tradisi agama.

Keberhasilan modernisasi Barat tersebut kemudian memasuki dunia Islam pada abad ke sembilan belas. Masuknya modernisasi ini kemudian menimbulkan persoalan dalam dunia Islam. Guna menghadapi modernisasi ini, para pemimpin Islam mengadaptasi gerakan tersebut. Sejak saat itu, kata modernisasi diterjemahkan ke bahasa Arab menjadi *al-tajdid* atau dalam bahasa Indonesia berarti pembaharuan. Mesir menjadi lahan baru bagi persemiaan pembaruan Islam bercorak modernis. Tokoh-tokoh pembaru yang terkemuka antara lain Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha

Kegagalan yang diterima oleh para pembaru Islam di Indonesia pada masa sebelumnya membuat para pembaharu berikutnya berpikir untuk mengemas gagasan mereka dalam format yang baru. Gagasan pembaruan dari Mesir yang saat itu menyebar dipilih oleh pembaharu masa ini.

Tokoh dari daerah Minangkabau yang berusaha mengenalkan gagasan pembaruan adalah Haji Abdullah Ahmad. Lelaki kelahiran

¹⁵M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 215.

¹⁶Muhammad Tafsir, "Tentang Kurikulum Sekolah Muhammadiyah", *Berkala*, No.1/Vol. V/ 1988, hlm. 73.

Padang Panjang tahun 1878 adalah anak dari seorang ulama dan pedagang kecil bernama Haji Ahmad. Pemikiran Haji Abdullah Ahmad mengenai pembaruan dilaksanakan dengan mendirikan sekolah agama pertama di Padang Panjang tahun 1907 yang diberi nama *Adabiah School*. Penamaan ini dimaksudkan agar sekolah tersebut menjadi simbol kebangkitan ilmu pengetahuan dan penunjang peradaban Islam melalui pendidikan.¹⁷ Layaknya sekolah bentukan pemerintah Kolonial, terdapat sistem kelas, kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan dengan menggunakan bangku, meja, papan tulis, dan buku-buku. Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ini sama adalah agama Islam, tidak jauh berbeda dengan pelajaran di Surau yang ditambahi dengan pengetahuan umum seperti menulis, membaca, dan berhitung.¹⁸

Berdirinya sekolah *Adabiah* diikuti sekolah-sekolah lain seperti *Madras School* yang didirikan oleh Thaib Umar pada tahun 1910. Berlokasi di Sungayang, sekolah ini memberikan pelajaran kitab-kitab besar dengan sistem *halaqah*.¹⁹ Akan tetapi, sekolah ini hanya mampu bertahan hingga tahun 1913 karena kekurangan tenaga pengajar.

Kemajuan yang ditunjukkan oleh sekolah-sekolah diatas merangsang para

pengurus surau untuk mengejar ketertinggalan. Modernisasi surau tidak dapat dilepaskan dengan organisasi bernama "*Persaiyoan*" yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid-murid seperti sabun mandi dan sabun cuci. Di kemudian hari, organisasi ini lebih dikenal dengan nama *Perkumpulan Sabun*. Perkumpulan ini kemudian berkembang dan menjadi sebuah gerakan yang dibentuk tahun 1916.²⁰

Perkumpulan Sabun berubah menjadi *Thawalib* pada tahun 1918 dengan perluasan tujuan untuk pengajaran agama. Perubahan ini juga menandai perubahan nama Surau Jembatan Besi menjadi *Sumatera Thawalib*. Surau yang dipimpin oleh Haji Abdul Karim Amrullah ini mengadaptasi sistem kelas serta menggunakan bangku dan meja dalam kegiatan belajar mengajar.²¹ Mata pelajaran umum juga diajarkan dalam lembaga ini.

B. Peran K.H. Hisyam dalam Pengembangan Pendidikan Muhammadiyah tahun 1920-1937

1. Riwayat Hidup K.H. Hisyam

K.H. Hisyam merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan sejarah Muhammadiyah. Djarnawi menyebut K.H. Hisyam sebagai seorang *abdi dalem* Keraton

¹⁷Burhanudin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 82.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992), hlm. 63.

²⁰Muarif, *Modernisasi Pendidikan Islam Sejarah dan Perkembangan Kweekschool Moehammadiyah 1923-1932*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hlm. 53.

²¹Mahmud Yunus, *op.cit.*, hlm. 73.

Yogyakarta.²² Badannya gemuk agak pendek, kulitnya kehitaman namun bersih. Seorang yang serius namun sering pula tertawa dengan sopan. Sikapnya tenang berwibawa, jalannya perlahan tetapi mantap. Ia selalu mengenakan jas tutup berwarna putih dan kepalanya juga selalu berlilitkan sorban dengan warna sama.

Sebagai seorang yang peduli terhadap pendidikan dan pengajaran, K.H. Hisyam memberikan pendidikan setinggi-tingginya kepada anak-anaknya. Dua orang putranya, yaitu Muhammad Ziad dan Muhammad Hajam merupakan lulusan sekolah pemerintah. Muhammad Hajam menamatkan studinya di *Hogere Kweekschool* di Purworejo dan Muhammad Ziad di *Europese Kweekschool* di Surabaya. Selanjutnya adalah Muhammad Djazari mengenyam pendidikan di Perguruan Al Irsyad.²³

Masyarakat Kauman umumnya bekerja sebagai *abdi dalem*. Di samping itu, mereka juga mempunyai penghasilan tambahan dari membatik. Pada mulanya, masyarakat Kauman hanya menggantungkan mata pencaharian sebagai abdi dalem dan istri mereka membantu bekerja sambil membatik. Ketika akhirnya batik menjadi profesi yang menguntungkan, lahirlah pengusaha-pengusaha batik. Profesi ini juga ditekuni oleh K.H. Hisyam Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan sebuah selebaran dalam suara Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa istrinya yang juga

anggota Aisyiyah adalah pengusaha batik. Beberapa nama pengusaha batik perempuan yang tercantum selain istri K.H. Hisyam antara lain seperti Bu Sofingi, Fatmah Wasool Djafar, B. Chotib Miri, Bu Abdulhadi, Bu Ngali, Bu Abdulkahar, Bu Achmad, Bu Jasin, dan Bu Doerachman.²⁴

2. Peran K.H. Hisyam dalam Pengembangan Pendidikan Muhammadiyah

Keterlibatan K.H. Hisyam dalam organisasi Muhammadiyah telah tercatat sejak lama bahkan sebelum pendirian organisasi Muhammadiyah. Ketika K.H. Ahmad Dahlan akan mendirikan Muhammadiyah dengan bantuan Boedi Oetomo, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah minimal ada tujuh orang anggota biasa Boedi Oetomo yang mengajukan diri untuk mendirikan organisasi baru tersebut. Menanggapi persyaratan ini, K.H. Ahmad Dahlan kemudian membicarakannya dalam sebuah pertemuan. Hasil dari pertemuan ini diantaranya ada tujuh orang yang sanggup menjadi anggota Boedi Oetomo yaitu, H. Syarkawi, H. Abdulgani, H.M. Sudja, H.M. Hisyam, H.M. Fachroedin, H.M. Tamim, dan K.H. Ahmad Dahlan sendiri yang semuanya berasal dari Kauman.²⁵

Pada mulanya, ruang lingkup yang diajukan dalam rumusan ini meliputi Jawa dan Madura. Namun, pemerintah Hindia Belanda tidak menyetujuinya karena dianggap terlalu

²²Djarnawi Hadikusuma, *Matahari-matahari Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2010), hlm. 45.

²³*Ibid.*

²⁴Hajar Nur Setyowati, “Aisyiyah: dari *Baby Show* sampai *Tabligh*”, *Basis*, No. 01-02, Th. ke-59, 2011, hlm. 15.

²⁵M. Sudja’, *op.cit.*, hlm. 102.

luas. Akhirnya, berdasarkan besluit pemerintah Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, Pemerintah Hindia Belanda mengakui Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di wilayah Residensi Yogyakarta.²⁶

Setelah delapan tahun Muhammadiyah berdiri, pada bulan Juni 1920 diadakan acara pelantikan pengurus bagian Muhammadiyah. Terbentuklah empat bagian baru dalam Muhammadiyah, yaitu Bagian Tabligh yang diketuai oleh H.M. Fachroedin, Bagian Taman Pustaka yang diketuai oleh H.M. Mochtar, Bagian Penolong Kesengsaraan Umum yang diketuai oleh H.M. Syuja', dan Bagian Sekolah yang dipimpin oleh H. Hisyam.

Setelah mendapat penunjukan sebagai Ketua Bagian Sekolah, K.H. Hisyam berusaha dengan tekun untuk memperbaiki sekolah Muhammadiyah. Secara teratur, ia memperbaiki pengorganisasiannya, meningkatkan mutu pelajaran, dan mengawasi guru-guru yang ada di sekolah Muhammadiyah.

Pada tanggal 15 September 1923, K.H. Ibrahim selaku ketua *Hoofdbestuur* Muhammadiyah mengeluarkan maklumat yang berisi pendirian *Madjelis Pimpinan dan Pengajaran Moehammadijah* atau MPM. Tugas MPM adalah mengawasi, mengatur, dan memperbaiki pengajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Pimpinan MPM saat itu diserahkan pada tiga orang, yaitu M.Ng.

²⁶Arsip Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Salinan Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 22 den Augustus 1914 (No. 81)*.

Djojosoegito, R.Sosrosoegondo dan K.H. Hisyam.²⁷

Hanya dalam waktu kurang dari setahun, ketiganya berhasil menyusun kebijakan strategis bagi perbaikan sekolah Muhammadiyah. Pada tahun 1924, MPM mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan yaitu "*Ketentoean oentoeck Moehammadijah Bahagian Sekolahan tentang Sekolah-sekolah Moehammadijah*".²⁸ Pada tahun yang sama, MPM juga menyusun *Rangrang Pengadjaran (Leerplan)* atau kurikulum pada sekolah Kelas II Moehammadijah.²⁹

Selain menyusun kebijakan bagi perbaikan sekolah Muhammadiyah, K.H. Hisyam juga mengupayakan subsidi untuk sekolah Muhammadiyah. K.H. Hisyam berpendirian sebaiknya Muhammadiyah mau memanfaatkan subsidi pemerintah itu bagi kemajuan sekolah-sekolahnya. Kebijakan ini disetujui oleh *Hoofdbestuur* Muhammadiyah. Secara perlahan-lahan, Muhammadiyah yang telah memenuhi syarat berhasil memperoleh bantuan tersebut, meskipun jumlahnya

²⁷Muarif, *op.cit.*, hlm. 97.

²⁸"Ketentoean oentoeck Moehammadijah Bahagian Sekolahan tentang Sekolah-sekolah Moehammadijah", dalam *Soeara Moehammadijah*, No. 4, Th. ke-5, 12 Maret 1924.

²⁹"*Leerplan* Sekolah Kelas II Muhammadiyah", dalam *Soeara Moehammadijah*, No. 4, Th. ke-5, 12 Maret 1924.

tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan yang diperoleh pihak Katolik ataupun Kristen.

Semakin banyaknya sekolah swasta yang didirikan oleh masyarakat Indonesia menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Kolonial. Karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diberi nama *Toezicht Ordonantie Particulair Onderwijs*. Di kemudian hari, kebijakan ini lebih dikenal dengan nama *De Wilde Scholen Ordonantie* atau “Ordonansi Sekolah Liar” 1932. Ordonansi Sekolah Liar 1932 dapat dipilah menjadi empat bagian. Pertama, mengatur tentang guru-guru sekolah swasta. Kedua, mengatur permasalahan tentang sekolah yang digunakan sebagai tempat mengajar. Ketiga, ancaman hukuman apabila terjadi pelanggaran terhadap ordonansi ini, dan keempat, mengenai aturan peralihan.³⁰

Muhammadiyah sendiri pada awalnya bersikap ragu-ragu dalam menghadapi Ordonansi Sekolah Liar 1932. Hal ini disebabkan sebagian sekolah Muhammadiyah mendapat subsidi dari pemerintah kolonial.³¹ Sikap ini berubah ketika Muhammadiyah pada akhirnya merasa dirugikan oleh Ordonansi Sekolah Liar.

³⁰Tugas Tri Wahyono, “Perlawanan Muhammadiyah terhadap Pelaksanaan Ordonansi Guru 1925 dan Ordonansi Sekolah Liar 1932” dalam Dwi Ratna Nurhajarini dkk, *Merajut Kebhinekaan, Membangun Indonesia: Perspektif Sejarah dan Budaya*, (Yogyakarta: BPNB D.I. Yogyakarta, 2017), hlm. 81.

³¹Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 200.

Penolakan kemudian dilakukan oleh Muhammadiyah melalui tiga cara. Pertama, K.H. Hisyam yang merupakan representasi dari *Hoofdbesuur* Muhammadiyah di akhir tahun 1932 ikut serta bergabung menentang ordonansi ini bersama Taman Siswa dan organisasi lainnya.³² Selanjutnya, Muhammadiyah juga mengadakan kongres untuk menyampaikan pendapat mengenai penolakan terhadap Ordonansi Sekolah Liar yang akan disampaikan kepada Gubernur Jenderal.³³ Terakhir, memperjuangkan penolakan bersama partai-partai politik dan surat kabar melalui *Volksraad*.³⁴

Setelah K.H. Ibrahim meninggal, K.H. Hisyam dipilih oleh sebagian besar anggota Muhammadiyah sebagai Ketua Pengurus Besar. Pencapaian yang ditunjukkan oleh K.H. Hisyam selama terlibat dalam struktur kepengurusan Muhammadiyah merupakan modal penting yang dijadikan dasar oleh anggota Muhammadiyah memilihnya sebagai ketua baru dalam Kongres ke-23 di Yogyakarta. K.H. Hisyam terpilih pada tahun 1935 dan tahun 1936.

³²”Poetoesan Pertama dari Moehammadiah, dalam *Poesara*, Jilid III, No.2-3, November-Desember 1932, hlm. 36.

³³”Poetoesan Komprensi Konsoel Moehammadijah di Mataram H.B. 18-20 November 1932”, dalam *Poesara*, Jilid III, No.2-3, November-Desember 1932, hlm. 40.

³⁴Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm.43.

Pada tahun 1936 ketika dilaksanakan kongres seperempat abad Muhammadiyah di Betawi terdapat berbagai keputusan penting yang menjadi titik tolak pendidikan Muhammadiyah pada masa berikutnya. Dalam pelaksanaan kongres ini diputuskan untuk merumuskan dasar-dasar Perguruan Muhammadiyah.³⁵ Gagasan pendirian universitas juga segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Pendirian universitas diserahkan sepenuhnya ke Cabang Betawi dengan pengawasan MPM.

Prestasi yang ditorehkan K.H. Hisyam dalam bidang pendidikan ternyata tidak mendapat respon positif dari angkatan muda Muhammadiyah. Mereka menilai *Hoofdbestuur* lebih disibukkan oleh urusan pendidikan dan mengabaikan bidang tabligh dan dakwah. Angkatan muda juga memandang bahwa Muhammadiyah dikuasai oleh tiga tokoh angkatan tua, yaitu K.H. Hisyam (Ketua *Hoofdbestuur*), K.H. Mochtar (wakil Ketua), dan K.H. Syuja' (Ketua Majelis Pertolongan Kesengsaraan Oemoem).³⁶

Menjelang 1937, ketidakpuasan angkatan muda memperoleh dukungan dari berbagai daerah. Dalam kongres ke-26 Muhammadiyah tahun 1937, angkatan muda mengajukan calon ketua di luar trio tersebut, namun mengalami kegagalan.

³⁵Farid Setiawan, *op. cit.*, hlm. 214.

³⁶“K.H. Hisyam: Peletak Dasar Organisasi Modern dan Penyebar Sekolah Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, No. 13, Th. ke-90, 1-15 Juli 2005.

Hasil ini tentu mengecewakan angkatan muda. Untuk menyelesaikan permasalahan ini diadakan musyawarah yang dihadiri oleh angkatan muda dan susunan *Hoofdbestuur* serta ketiga tokoh yang menjadi persoalan juga diundang. Musyawarah berlangsung dengan baik, penuh dengan keikhlasan dan keterbukaan. Pada akhirnya, ketiga tokoh tersebut dengan penuh keikhlasan bersedia mengundurkan diri.³⁷

C. Pengaruh Kebijakan K.H. Hisyam Terhadap Keberadaan Sekolah Muhammadiyah

1. Perubahan Kurikulum

Sejak merencanakan sekolah modern, K.H. Ahmad Dahlan memasukkan pembaruan kurikulum sebagai bagian didalamnya. Langkah ini diambil karena saat itu melihat adanya dua lembaga pendidikan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pendidikan Belanda hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum yang akan menghasilkan lulusan yang jauh dari nilai-nilai keislaman. Di sisi lain, pendidikan Islam tradisional hanya mengajarkan ilmu agama dan mengabaikan pengetahuan umum yang sebenarnya bermanfaat bagi pembangunan peradaban umat Islam. Sejak awal pendiriannya, Muhammadiyah menganggap pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuannya.

Sebagai penerus K.H. Ahmad Dahlan yang mengurus bidang pendidikan, K.H.

³⁷Djarnawi Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 58.

Hisyam berupaya menyempurnakan kurikulum yang telah dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan. Berkolaborasi dengan Suara Muhammadiyah, K.H. Hisyam mempublikasikan kurikulum sekolah Muhammadiyah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sekolah Muhammadiyah. Dalam pelaksanaannya, dirumuskan dua model kurikulum yang menjadi acuan dalam sekolah Muhammadiyah.

Pertama, kurikulum yang mengadaptasi kurikulum sekolah kolonial dan ditambahkan mata pelajaran agama Islam di dalamnya. Kurikulum model ini diterapkan dalam sekolah-sekolah umum Muhammadiyah seperti *Volkschool*, *Standardschool*, *Holland Inland School* (HIS), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), dan *Holland Inlands Kweekschool* (HIK).³⁸ Sekolah-sekolah ini mengikuti kurikulum pemerintah yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum ditambah dengan ilmu agama. Perbandingan kedua mata pelajaran biasanya 10 persen atau 15 persen untuk pelajaran agama dari keseluruhan kurikulum.

Model kurikulum *kedua* adalah kurikulum khas Muhammadiyah.³⁹ Dalam kurikulum model ini disusun berdasarkan kebutuhan Muhammadiyah sendiri. Salah satu contohnya adalah kebutuhan Muhammadiyah akan kurangnya kader muda yang sanggup menjadi *mubaligh/mubalighat*. Untuk

memenuhi kebutuhan ini, Muhammadiyah mendesain kurikulum yang lebih menonjolkan pelajaran agama Islam dengan pelajaran umum sebagai tambahan di dalamnya. Kurikulum ini hanya diterapkan dalam sekolah khusus keagamaan. Proporsi pelajaran umum dalam kurikulum ini kurang lebih hanya 30 persen dari keseluruhan mata pelajaran yang ada. Beberapa diantaranya adalah Madrasah Ibtidaiyah, Diniyah, Mubalighin, Mualimin-Mualimat, dan Zuama. Salah satu hasil rumusan dalam model kedua ini adalah *leerplan* Madrasah Diniyah atau *Dinijahschool* yang dikeluarkan tahun 1930.⁴⁰

2. Peningkatan Jumlah Sekolah Muhammadiyah

Pada masa awal terbentuknya bagian Sekolah yang diketuai oleh K.H. Hisyam pada tahun 1920, Muhammadiyah baru memiliki sekolah sebanyak 7 buah yang meliputi 4 Sekolah Angka 2, satu Sekolah Calon Guru, sebuah sekolah agama dan satu HIS Met De Quran.⁴¹ Semua sekolah ini masih berada di wilayah Yogyakarta. Meskipun baru memiliki tujuh sekolah, namun terjadi peningkatan jumlah murid yang masuk ke sekolah Muhammadiyah hanya dalam kurun waktu tiga tahun.

Keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah terus menunjukkan grafik

³⁸A. Jainuri, *Muhammadiyah: Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Keduapuluh*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hlm. 72.

³⁹Farid Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 243.

⁴⁰Hoofdbestuur Moehammadijah Hindia-Timoer Djogjakarta, *Pemimpin*, Yogyakarta, 1930.

⁴¹Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 61.

positif. Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, jumlah sekolah Muhammadiyah bertambah menjadi 93 buah di Pulau Jawa.⁴² Sekolah ini terdiri dari *Inlandsche Onderwijs* yang meliputi *volkschool* dan sebagainya serta *Westerch Lager Onderwijs* yang meliputi HIS, ELS, dan HCS. Meskipun secara kuantitas menunjukkan peningkatan, namun jika dibandingkan dengan jumlah sekolah milik pemerintah angka ini masih terpaut jauh. Sekolah milik pemerintah dalam jenjang yang sama jumlahnya mencapai 10.972 buah di Pulau Jawa pada tahun 1928.

Peningkatan ini masih terus berlanjut. Sekolah Muhammadiyah meningkat secara pesat di Pulau Jawa dengan total 324 sekolah pada tahun 1932.⁴³ Sekolah ini meliputi sekolah dengan sistem pendidikan Barat (*volkschool*, *standaardschool*, HIS, MULO, HIK, dsb), sekolah keagamaan (*diniyah* dan *wustha*), dan sekolah lainnya (sekolah Aisyiyah, sekolah untuk anak yatim, taman kanak-kanak, dan sebagainya).⁴⁴

Djarnawi Hadikusuma menuturkan bahwa pada tahun 1938 Muhammadiyah telah memiliki sekolah sejumlah 466 buah sekolah dengan sistem sekolah Barat.⁴⁵ Jumlah ini mencakup 216 *volkschool*, 84 *verlvolgshool*,

dan 166 HIS dan *schakelschool*. Dari sejumlah sekolah yang telah disebutkan diatas, sekolah Muhammadiyah hanya memperoleh subsidi hanya sejumlah 121 buah. Meskipun hanya sedikit, namun hal yang perlu dicermati adalah meningkatnya jumlah sekolah Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari figur K.H. Hisyam.

3. Perubahan Kualitas Guru

Pada masa K.H. Ahmad Dahlan, jumlah sekolah masih terbatas di kawasan Yogyakarta. Karena itu, kebutuhan akan banyaknya guru belum begitu terasa. Akan tetapi, setelah sekolah Muhammadiyah mulai tumbuh di berbagai daerah, maka kebutuhan akan guru ini menjadi kebutuhan yang mutlak⁴⁶, karena jika menggunakan guru non-Muhammadiyah tidak akan menghasilkan lulusan yang diharapkan oleh organisasi. Menyadari hal ini, K.H. Ahmad Dahlan mulai merintis sekolah guru yang diberi nama *Al-Qismul Arqa* pada tahun 1919.⁴⁷ *Al-Qismul Arqa* berasal dari kata bahasa Arab yaitu *al-qism* yang dalam berarti “bagian” dan *al-arqa* yang berarti “pertumbuhan”. *Al-Qismul Arqa* kemudian berubah namanya menjadi *Kweekschool* Muhammadiyah.⁴⁸

Keberadaan guru dari lulusan *Kweekschool* Muhammadiyah ternyata belum

⁴² *Ibid.*, hlm. 71.

⁴³ Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Abad Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010), hlm. 8.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Djarnawi Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 50.

⁴⁶ “Vorstel-vorstel”, dalam *Soeara Moehamadijah*, No. 6, Th. ke-7, Maret 1925. hlm. 194.

⁴⁷ Mh. Mawardi, “Perkembangan Perguruan Muhammadiyah: Dengan Benih Pengajian dan Sekolah Kyai (II)”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 10, Th. ke-58, Mei 1978, hlm. 12.

⁴⁸ *Ibid.*

dapat mencukupi kebutuhan guru sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah mendirikan CVO (*Cursuus voor Volkschool Onderwijzers*). Lulusan sekolah ini akan mengajar di *volkschool* atau Sekolah Desa pada tahun 1926.⁴⁹ Lamanya pendidikan di CVO adalah dua tahun. Mereka yang diterima di sekolah ini adalah tamatan dari Sekolah Kelas II.⁵⁰ Meningkatnya jumlah *Standaardschool* dan *Vervolgschool* yang dimiliki Muhammadiyah juga mendorong pendirian sekolah untuk guru yang mempunyai kapasitas mengajar di dua jenis sekolah tersebut. Karena itu, Muhammadiyah mendirikan *Normaalschool* di Solo pada tahun 1929.⁵¹ Adapun masa belajarnya adalah selama 4 tahun.

KESIMPULAN

Pendidikan memiliki nilai penting dalam organisasi Muhammadiyah. Sejak awal, keberadaan Muhammadiyah adalah untuk memperbarui pendidikan di Indonesia karena menghadapi kenyataan adanya dua sistem pendidikan yang saling bertentangan, yaitu pendidikan Barat yang hanya mengajarkan ilmu umum dan pendidikan Islam tradisional yang hanya mengajarkan ilmu agama.

Pendidikan Islam tradisional yang diwakili oleh Pesantren dan Surau mulai

terkikis keberadaannya memasuki abad ke-20 karena masuknya ide pembaruan Islam ke Indonesia. Sebagai organisasi yang mendukung pembaruan Islam, Muhammadiyah berupaya menyebarkannya, terutama melalui bidang pendidikan. Dilantiknya K.H. Hisyam membawa perubahan dalam sekolah Muhammadiyah. K.H. Hisyam melakukan perbaikan tata kelola sekolah Muhammadiyah agar memiliki daya saing menghadapi sekolah pemerintah. Hasilnya, sekolah Muhammadiyah mendapat subsidi dari pemerintah.

Upaya K.H. Hisyam berpengaruh terhadap keberadaan sekolah Muhammadiyah, antara lain perubahan kurikulum, peningkatan jumlah sekolah Muhammadiyah, dan perubahan kualitas guru. Perubahan ini pada akhirnya menghasilkan murid-murid yang mampu bekerja dalam birokrasi pemerintahan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekolah Muhammadiyah juga menghasilkan perubahan dalam bidang agama. Jika sebelumnya keagamaan masih mempraktekkan keagamaan Islam sinkretis dan tradisional, maka lulusan sekolah Muhammadiyah akan menghasilkan perubahan yang bebas dari tradisi yang sifatnya menghambat dari kemajuan masyarakat sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Hoofdbestuur Moehammadijah Hindia-
Timoer Djogjakarta, *Pemimpin*,
Yogyakarta, 1930.

⁴⁹Mh. Mawardi, *loc.cit.*

⁵⁰Mochtar Buchori, *Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool sampai ke IKIP*, (Yogyakarta: INSISTPress,2007), hlm. 15.

⁵¹Mh. Mawardi, *loc. cit.*

Arsip Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Salinan Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 22 den Augustus 1914 (No. 81)*.

Buku dan Jurnal

Ahmad Jainuri, *Muhammadiyah: Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Keduapuluh*, Surabaya: Bina Ilmu, 1991.

Achmad Jainuri, dkk., *Muhammadiyah dan Wahhabisme: Mengurai Titik Temu dan Titik Seteru*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.

Burhanudin Daya, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.

Djarnawi Hadikusuma, *Matahari-matahari Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.

Dwi Ratna Nurhajarini dkk, *Merajut Kebhinekaan, Membangun Indonesia: Perspektif Sejarah dan Budaya*, Yogyakarta: BPNB D.I. Yogyakarta, 2017.

Farid Setiawan, *Genealogi dan Modernisasi Sistem Pendidikan Muhammadiyah 1911-1942*, Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2015.

Gottschalk, Louis *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 2008.

Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Abad Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.

Majelis Diklitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta: Kompas, 2010.

Mochtar Buchori, *Evolusi Pendidikan di Indonesia dari Kweekschool sampai ke IKIP*, Yogyakarta: INSISTPress, 2007.

Mohammad Subhan dan Soeleiman Fadeli, *Antologi NU Buku I Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, Surabaya: Khalista, 2010.

Muarif, *Modernisasi Pendidikan Islam Sejarah dan Perkembangan Kweekschool Moehammadiyah 1923-1932*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

Muhammad Raihan Febriansyah, dkk., *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP. Muhammadiyah, 2013.

Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Seno, *Peran "Kaum Mudo" dalam Pembaharuan Islam di Minangkabau 1803-1942*, Padang: BPSNT Padang Press, 2010.

Suwarno, *Pembaruan Pendidikan Sayyid Ahmad Khan dan K.H. Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.

Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1996.

Yahdan Ibnu Humam Saleh, "Colonial Education Policy & Muhammadiyah's Education (Analitical Muhammadiyah History in Yogyakarta 1912-1942)", *Jurnal Al-Jamiah*, No. 47, 1991.

Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Majalah

Basis, No. 1-2, Th. Ke-59, 2011.

Berkala, No.1, Vol. V, 1988.

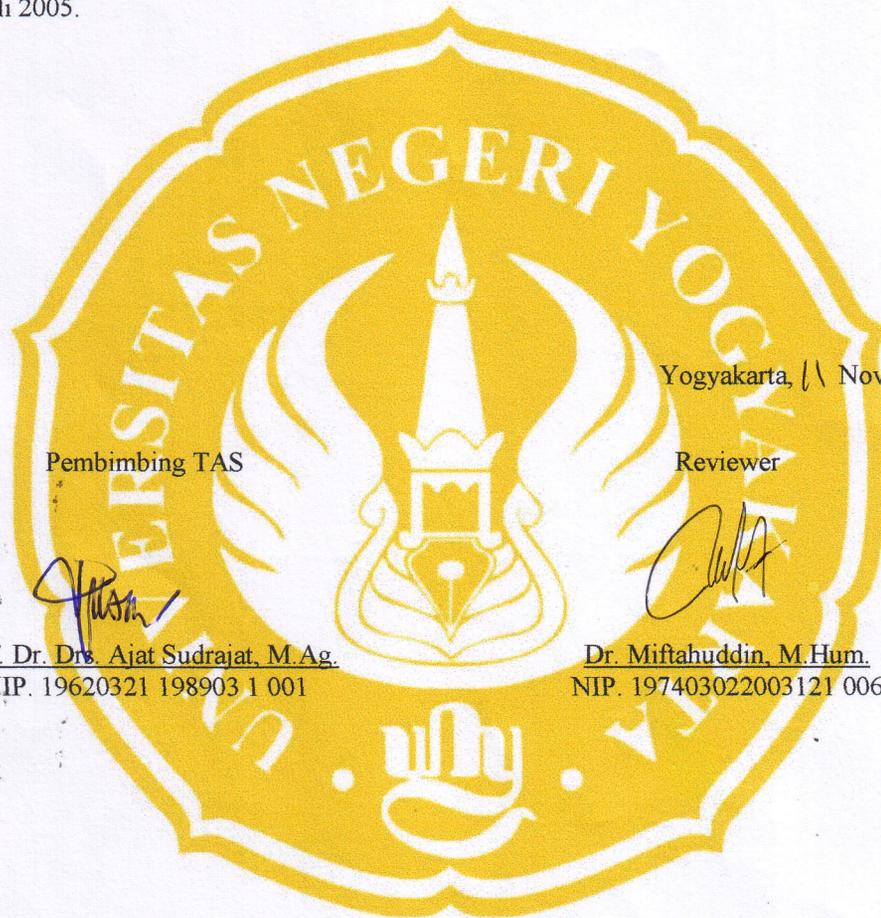
Poesara, No. 2-3, Jilid III, November-
Desember, 1932.

Soeara Moehammadijah, No. 4, Th. ke-5, 12
Maret 1924.

Soeara Moehammadijah, No. 6, Th. ke-7,
Maret 1925.

Suara Muhammadiyah, No. 10, Th. ke-58,
Mei 1978.

Suara Muhammadiyah, No. 13, Th. ke-90, 1-
15 Juli 2005.



Yogyakarta, 18 November 2019

Pembimbing TAS

Reviewer


Prof. Dr. Drs. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001


Dr. Miftahuddin, M.Hum.
NIP. 197403022003121 006